

PENERAPAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI MATA PELAJARAN PPKn

Miko Nugroho

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Mikonugroho311@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia membutuhkan upaya-upaya kongkrit dalam menjaga keberagaman tersebut. Upaya kongkrit tersebut bisa dilakukan dalam dunia pendidikan formal. Pendidikan sebagai salah satu kekuatan pembangun peradaban negara bangsa (*nation-state*) memiliki peran strategis dalam menjaga kemejemukan suatu negara, kenyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural sangat di butuhkan oleh Indonesia yang memiliki keberagaman agama, etnis, suku, budaya, adat dan lain sebagainya. PPKn sebagai salah satu mata pelajaran wajib diberbagai jenjang pendidikan di Indonesia memiliki posisi strategis dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan multikultural di ruang persekolahan. Multikultural dalam materi PPKn sudah seharusnya menjadi salah satu materi penting dalam pendidikan kewarganegaraan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Dalam melaksanakan pendidikan multikulturalisme melalui PPKn tentu membutuhkan pendekatan pembelajaran yang baik sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh peserta didik.

Kata kunci: *Multikultural, PPKn, Pendekatan Pembelajaran*

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bahasa, agama, dan golongan. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau tepatnya 1.340 suku bangsa (Na'im & Saputra, 2011). Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan kehidupan yang sangat beragam (plural), maka perlu pemahaman untuk hidup berdampingan secara damai pada masyarakat yang beranekaragam. Konsep sekarang pemahaman tersebut dikenal dengan istilah sikap multikultural. Lebih lanjut Ujan & dkk (2011) menyatakan sikap multikultural merupakan sikap yang terbuka pada perbedaan. Mereka yang memiliki sikap yang multikultural berkeyakinan, perbedaan bila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik, namun bila kita mampu mengelolanya dengan baik maka perbedaan justru memperkaya keberagaman.

Penduduk Indonesia haruslah menyadari dan menjaga keberagaman ini sebagai modal bagi bangsa Indonesia, bukan malah menjadi sumber terjadinya perpecahan. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang didengungkan oleh para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) menjadi salah satu ciri bahwa para pendiri bangsa telah melihat keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan Pancasila dalam sila ketiga, yaitu

Persatuan Indonesia. Ini berarti walaupun Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan golongan namun haruslah menjunjung tinggi persatuan.

Dalam kenyataannya Indonesia menurut Ratna (2014) orde reformasi paling banyak menampilkan bentuk-bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun simbolik, seperti demonstrasi, perkelahian antar pelajar, pertikaian antar kelompok, kekerasan dalam rumah tangga, terorisme, obat terlarang dan sebagainya. Maka dari itu sangatlah penting menumbuhkan kesadaran multikultural pada masyarakat sedini mungkin agar konflik yang terjadi dalam masyarakat baik vertikal ataupun horizontal dapat dihindarkan, dan masyarakat dapat hidup rukun saling berdampingan walaupun mereka berbeda etnis, bahasa, kultur, agama dan golongan.

Pendidikan menjadi salah satu wahana yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran bangsa Indonesia, akan pentingnya menjaga keberagaman yang dimiliki. Jika melihat perspektif budaya tentang definisi pendidikan yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat (Naim & Sanuqi, 2008) dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan usaha untuk mengalihkan adat istiadat dan seluruh kebudayaan dari generasi lama ke generasi baru. Melihat definisi tersebut maka jelas bahwa pendidikan menjadi salah satu media yang tepat untuk memberikan pemahaman tentang peran masyarakat dalam menjaga keberagaman. Penanaman nilai-nilai multikultural dapat dilaksanakan baik dalam lingkup pendidikan formal, informal maupun nonformal. Dalam pendidikan formal, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah adalah wahana yang tepat untuk penanaman nilai-nilai multikultural. Hal ini disamping karena sampai saat ini belum ada mata pelajaran khusus yang membahas tentang pendidikan multikultural di sekolah, juga karena mata pelajaran ini memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PEMBAHASAN

Konsep Multikultural

Multikultural berasal dari kata dasar “kultur” yang berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan yang mendapat awalan “multi” yang berarti banyak, ragam, atau aneka. Dengan demikian, multikultural dapat diartikan sebagai keragaman budaya sebagai ejawantah dari keragaman latar belakang seseorang (Dawam, 2003:100). Sebagai ejawantah dari latar belakang seseorang, keragaman budaya yang ada tentunya akan memiliki karakter atau jenis dari masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Hal ini senada dengan pengertian yang

diberikan oleh Ujan & dkk (2011: 153) multikultural sebagai kata sifat mengacu pada jenis masyarakat yang terdiri dari beraneka macam kelompok budaya.

Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan. Bahwa multikultural lebih mengacu kepada keberanekaragaman yang ada pada masyarakat baik itu dalam hal budaya, agama dan bahasa. Keberagaman tersebut timbul karena adanya latar belakang yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat.

Konsep Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural menurut Hilda Hernandez (Mahfud, 2013) merupakan pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu yang beragam dari latar belakang yang dimilikinya, sehingga dalam perjalannya setiap individu mampu menghargai dan menyadari konsekuensi dari keberagaman yang ada. Dalam menimbulkan kesadaran tersebut pendidikan multikultural harus mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada setiap individu. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ainurrafiq Dawam (Naim & Sanuqi, 2008) menyatakan pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama). Pendidikan multikultural dari dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu proses pengembangan dan penanaman sikap saling menghargai pluralitas dan heterogenitas, yang ada dalam masyarakat sebagai dampak dari beragamnya budaya, ras, seksualitas, dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Prinsip Pendidikan Multikultural

Terdapat tiga prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Tilaar (2004): *Pertama* pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia (*equitypedagogy*). Dalam mengembangkan pendidikan multikultural, pendidik haruslah mengacu kepada kesetaraan manusia. Hal ini berkenaan dengan keberagaman yang dimiliki oleh setiap individu, walaupun mereka beragam, pendidik harus berusaha menekankan bahwa hal itu bukan merupakan suatu alasan bagi satu kelompok menjadi lebih dominan.

Kedua pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Selain untuk menciptakan manusia yang sadar akan pentingnya memahami, dan menjaga keberagaman yang ada.

Ketiga Prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. Arus globalisasi yang begitu cepat, membuat suatu negara harus memiliki kekuatan dalam menghadapinya. Keberagaman yang dimiliki

Indonesia dapat menjadi kekuatan, dan sebagai ciri bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, maka keberagaman tersebut haruslah dikelola, salah satu medianya adalah dengan pendidikan multikultural.

Dalam bukunya Pendidikan Multikultural Mahfud (2004) pendidikan multikultural di Indonesia memiliki signifikansi diantaranya: *Pertama* pendidikan multikultural sebagai sarana alternatif pemecahan konflik sosial. Karena pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menanamkan sikap saling menghargai, dan menghormati antar manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda, maka konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat akan dapat diminimalkan.

Kedua pendidikan multikultural sebagai pembina agar peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya. Dalam pendidikan multikultural, peserta didik akan tahu dan paham akan keberagaman yang mereka miliki, baik itu budaya, agama, suku dan lain sebagainya. Karena pendidikan multikultural juga menekankan akan pentingnya menjaga keberagaman tersebut, maka peserta didik akan mampu mencintai dan melestarikan budaya mereka masing-masing, sehingga mereka tidak akan tercerabut dari akar budaya mereka.

Ketiga sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan nasional. Mengingat keadaan bangsa Indonesia yang sangat kaya akan budaya, maka pendidikan multikultural sangatlah tepat untuk dijadikan kurikulum dalam pendidikan. Karena sejauh ini belum adanya mata pelajaran yang khusus menelaah tentang multikultural.

Keempat menciptakan masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia sangatlah beranekaragam. Maka perlulah pendidikan multikultural guna menjadikan masyarakat tersebut sadar dan mampu menjaga keberagaman itu, dan mampu menjadi masyarakat multikultural.

Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang memberikan pemahaman tentang peran-peran sebagai warga negara, baik secara politik, sosial, dan kultural. Sehingga mereka akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai peran masing-masing. Selain itu pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman tentang keberagaman yang ada disekitar mereka, sehingga mereka akan mampu memahami dan saling menghargai keberagaman tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Departemen Pendidikan Nasional, 2003) yaitu,

“Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945”.

Dalam memberikan pemahaman mengenai keberagaman dan peran mereka sebagai warga negara, baik itu peran dalam bidang politik, sosial, dan kultural, pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan secara demokratis, dan tidak membeda-bedakan peserta didik satu sama lainnya. Prosesnya dapat dilaksanakan dengan pendidikan dialogis, sebagai salah satu penerjemahan dari pendidikan yang demokratis.

Fungsi pendidikan kewarganegaraan sesuai bagian pendahuluan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 Tahun 2006, adalah kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini berarti bahwa fungsi dari pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberikan pengetahuan semata namun lebih luas dari pada itu.

Sejalan dengan pendapat Keer (1999) Pendidikan Kewarganegaraan ditafsirkan secara luas adalah mempersiapkan orang-orang muda untuk kedepan dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dapat disimpulkan fungsi dan tujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai generasi baru yang memiliki kemampuan dalam berfikir kritis, mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang berbeda latar belakang dan saling toleran.

Konsep Pendekatan Multikultural dalam Pembelajaran PPKn

1. Macam-macam Pendekatan Pembelajaran

a. Pendekatan Ditinjau dari Segi Proses

Pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi proses, menurut Percival dan Ellington (Rianto, 2006) dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pendekatan yang Berorientasi Pada Guru atau Lembaga Pendidikan

Pendekatan yang berorientasi kepada guru/lembaga pendidikan merupakan sistem pembelajaran yang konvensional dimana hampir semua kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan (sekolah). Selama proses pembelajaran peserta didik hanya menerima apa saja yang disampaikan oleh guru dan hanya sekali-kali diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.

2) Pendekatan Pembelajaran yang Berorientasi Pada Peserta Didik

Pembelajaran yang menunjukkan peserta didik lebih aktif selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing.

2. Pendekatan Pembelajaran Ditinjau dari Segi Materi

Ditinjau dari segi materi, pendekatan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua (Rianto, 2006) yaitu:

a. Pendekatan Kontekstual

Pembelajaran yang dikembangkan menggunakan pendekatan substansi (*content*) pelajaran dikontekskan pada situasi kehidupan disekitar peserta didik ini dengan pertimbangan akan memperlancar proses belajar mereka sekaligus memahami dan menyadari bahwa pengetahuan yang didapatkan di sekolah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga akan memberikan manfaat bagi kehidupannya.

b) Pendekatan Tematik

Pendekatan tematik sebagai suatu pembelajaran dimana materi yang akan dipelajari oleh peserta didik disampaikan dalam bentuk topik-topik dan tema yang dianggap relevan. Pembelajaran dengan pendekatan tematik dapat dilaksanakan untuk satu disiplin ilmu atau multidisiplin ilmu.

3. Pendekatan multikultural dalam Pembelajaran PPKn

Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik tentunya memiliki strategi dan pendekatan dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Pendidikan multikultural di Indonesia lebih tepat dipandang sebagai pendekatan, yaitu pendekatan pendidikan yang mengupayakan agar nilai-nilai budaya kedaerahan (suku bangsa) dan agama di Indonesia dapat dipahami, dihargai, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan kebangsaan kewarganegaraan berlandaskan semboyan "*bhinneka tunggal ika*" dan falsafah Pancasila, dengan mengedepankan toleransi dan kerukunan antar budaya dan pemeluk agama (Amirin:2012).

Dari pengertian tersebut pendidikan kewarganegaraan, sangat menghargai, dan mencoba mengembangkan keberagaman latar belakang yang ada dalam masyarakat. Ini berarti bahwa sesungguhnya pendidikan PPKn sangat memberikan ruang dalam keberagaman, bahkan tidak hanya memberikan ruang, tapi mengakui keberagaman tersebut sebagai suatu realitas sosial yang harus dijaga dan dikembangkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan multikultural sangatlah tepat jika digunakan dalam proses pembelajaran PPKn. Dimana pendekatan multikultural dan isi dari pendidikan Kewarganegaraan sangat toleran dan menjunjung tinggi keberagaman, baik aspek agama, sosial, budaya, bahasa dan lain sebagainya.

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang sangat relevan dalam menumbuhkan sikap kesadaran multikultural. Hal ini dapat dilihat dari tujuan mata pelajaran PPKn yang membentuk warga negara yang baik. Salah satu indikator warga negara yang baik dalam negara Indonesia adalah memiliki sikap saling toleran yang tinggi terhadap perbedaan.

Saran

Pendidikan multikultural sangat urgent untuk mengelolah Indonesia yang plural. Implementasi dari pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui salah satunya pendidikan formal atau sekolah. Mata pelajaran yang paling dekat untuk membunikan pendidikan multikultural adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, oleh karena itu Pemerintah perlu memberikan dukungan melalui pembentukan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan multikultural disekolah. Selanjutnya ditingkat sekolah harus bersinergi dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. (2012). Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Volume 1, Nomor 1.
- Dawam, A. (2003). *Emoh Sekolah*. Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Perss.
- Keer, D. (1999). *Citizenship Education in the Curriculum: an International Revie*. UK: National Foundational for Educational Resesarch.
- Mahfud, C. (2013). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Na'im, A., & Saputra, H. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Naim, N., & Sanuqi, A. (2008). *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ratna, K, N. (2014). *Peranan Karya Sastra, Seni, dan Budaya Dalam Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rianto, M. (2006). Pendekatan, Strategi, dan Model Pembelajaran. *Diklat Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA*. Malang: Depertemen Pendidikan Nasional; Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; Psat Penataran Guru IPS dan PMP Malang.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme. Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Ujan, A. A., & Dkk. (2011). *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT. Indeks.
- Winarno. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan: Standar Isi dan Pembelajarannya*. Surakarta: UNS.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Th 2006 Tentang Standar Isi Untuk satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah